

SKRIPSI

**STRATEGI KPU KABUPATEN MAJENE DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN POLITIK MENJELANG PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF
TAHUN 2024 DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR**

ANJALI

NIM: F0119302

Diajukan Sebagai salah satu persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ilmu

Politik (S.IP) pada Program Studi Ilmu Politik



PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

UNIVERSITAS SULAWESI BARAT

2024

SKRIPSI

**STRATEGI KPU KABUPATEN MAJENE DALAM MEMBERIKAN
PENDIDIKAN POLITIK MENJELANG PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2024
DI KECAMATAN BANGGAE TIMUR**

Di persiapkan dan di susun oleh :

ANJALI

NIM : F0119302

Telah di ajukan Didepan Dewan Penguji penguji

pada tanggal 20 Mei 20224, Dan Dinyatakan **LULUS**
Susunan penguji

Pembimbing 1



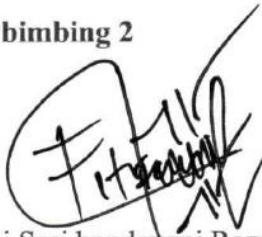
Dr.H. Burhanuddin, M.Si
NIP : 196209191989031004

penguji 1



Asriani, S.IP, M.Si
NIP: 198406242019032017

Pembimbing 2



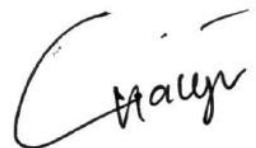
Fitriani Sari handayani Razak, S.IP, MA
NIP : 199010302022032011

Penguji 2



Andi Nur Fiqhi Utami, S.IP, M.I.P
NIP: 199308272019032022

Penguji 3



Citra N. Fariaty, S.IP, M.Si
NIP: 199201262018032001

ABSTRAK

Skripsi ini membahas tentang Strategi KPU Kabupaten Majene dalam memberikan Pendidikan Politik Menjelang Pilkada Pemilihan umum Legislatif tahun 2024 Di Kecamatan Banggae Timur. Tipe Penelitian Yang di gunakan adalah Metode penelitian kualitatif dengan Menggunakan informan sebanyak 8 orang dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Tujuan Penelitian ini bertujuan untuk Strategi KPU dalam memberikan pendidikan politik dalam Meningkatkan partisipasi pendidikan Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Strategi yang di lakukan KPU Kabupaten Majene Dalam memberikan pendidikan Politik menjelang pilkada pemilihan umum legislatif tahun 2024 di Kecamatan Banggae Timur, Dapat dilihat dari Bentuk Strateginya dengan beberapa persiapan kinerja staf KPU, menggunakan media sosial dan media elektronik. sosialisasi pendidikan politik yang dilakukan kepada masyarakat umum diantaranya, masyarakat pekerja, anak SMA, mahasiswa dan masyarakat umum sesuai dengan metode yang digunakan. Penyebab masyarakat enggan ikut berpartisipasi atau menggunakan hak pilihnya saat pemilu yaitu kurangnya pendidikan politik, ketidakpercayaan kepada pemimpin dan adanya sifat acuh yang ada pada diri masyarakat.

Kata kunci: Strategi KPU, Pendidikan Politik dan Pemilihan Umum

BAB I

PENDAHULUAN

A . Latar Belakang Masalah

Di Sulawesi Barat tepatnya di Kabupaten Majene banyak faktor penyebab tingkat psrtisipasi politik masyarakat mengalami penurunan antara lain jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi. Ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan perbaikan kualitas hidup kesalaha administratif penyelenggaraan pemilu adanya paham keagamaan anti korupsi dan melemahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya pemilu sebagai instrument transformasi sosail. Maka dari itu masih perlu ada pendidikan politik terhadap masyarakat betapa pentingnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu.

Menurut data sebanyak 15.092 orang tidak menggunakan hak pilihnya pada Pilkada tahun 2020 dari data 115.091, serta data jumlah pemilih pemula pada Pilkada serentak tahun 2020 itu sebanyak 7.517 orang atau sekitar 20%.¹ Dapat disimpulkan bahwa 107.464 pada Tahun 2015 daftar pemilih Pilkada serentak, sekitar 17.090 masyarakat tidak menggunakan hak pilihnya. Karena masih adanya masyarakat khususnya di Kabupaten Majene Kecamatan banggae yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam berpartisipasi terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak di Kabupaten Majene. Alasannya karena masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui sangat pentingnya partisipasi mereka ketika diadakannya Pilkada serentak, karena kebanyakan dari masyarakat sendiri belum

¹ <http://unpeks.co.id/2020/10/kpu-majene-tetapkan-dpt-pilkada-2020-terdata-115-091-pemilih/>

sepenuhnya mengetahui manfaat Pemilu,. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya masyarakat tidak menggunakan hak memilihnya dalam memilih.

Adapun masalahnya adalah yang pertama, sulit menyadarkan masyarakat dengan kondisi masyarakat yang mengalami kekurangan dan keterbatasan lebih fokus kepada kehidupan sehari-hari akan sulit di ajak untuk berkonsientasi diri mengungkapkan persoalan yang ada . kedua masyarakat yang begitu sulit percaya terhadap berbagai edukatif dan gerakan politik. dan sulit untuk mengajak masyarakat untuk berpikir mengenai pentingnya berpartisipasi politik, karena masyarakat masih apatisme dan sinisme politik. Ketiga, latar belakang pendidikan masyarakat yang masih kurang, mengakibatkan masyarakat sulit paham adanya kompleksitas sosial politik sekitar dirinya serta faktor pengetahuan yang masih rendah. Selanjutnya masyarakat yang awam akan politik uang, pada saat pilkada akan dimulai masih banyak masyarakat yang ingin mendapat bantuan ataupun barang dari caleg . dan ini perlu ada dalam memperkuat partisipasi masyarakat adalah 1.memperkuat narasi solidaritas sosial gotong royong dan empati masyarakat, 2.membangun ruang untuk mengelola partisipasi masyarakat, 3.penguatan jejaring struktur.

Seringkali masalah yang dialami di majene dalam pemilu adalah banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya Hal ini disebabkan kurangnya tingkat partisipasi politik masyarakat dan ketidak percayaan terhadap pemerintah dan janji janji yang tidak sesuai yang diberikan oleh calon pemimpinnya. contohnya masyarakat di janji oleh calon pemimpin untuk perbaikan jalan dan nyatanya pada saat calon sudah duduk tidak ada satupun pergerakan dari pemerintah .

Adapun sebagian masyarakat yang tidak ikut dalam berpartisipasi karena masalah perekonomian contohnya ada masyarakat pada saat hari pemilihan lebih mementingkan untuk kerja dibanding ikut berpartisipasi untuk pemilu, dan ada juga masyarakat yang tidak ikut berpartisipasi karena tidak ada rasa kepercayaan terhadap penyelenggara pemilu. nah disini kita dapat pertanyakan bagaimana pihak KPU memberikan pendidikan politik terhadap masyarakat agar bisa berpartisipasi dalam menyelenggara pemilu.

Kurangnya pendidikan tingkat partisipasi politik masyarakat yang akan menjadi bahan evaluasi untuk dicarikan solusi agar penyelenggara pemilu yang akan datang dapat lebih sukses . selain persoalan sosialisasi dan partisipasi, Desk Pilkada mencatat adanya laporan pelanggaran pemilu kepada Panwaslu. Diantaranya soal, Pembagian sembako, tidak netralnya PNS, dan ketidaknetralan panitia Pemungutan suara. Faktor penyebab kurangnya partisipasi karena banyak warga yang merantau memilih tidak pulang saat hari pencomblosan seperti nya tidak sesuai target karena banyak yang merantau tidak pulang..”BK KPU Provinsi Sulbar khususnya di majene akan menindak setiap anggota KPU berupaya keras mengembalikan kepercayaan rakyat dengan memperbaiki kinerja KPU agar bekerja secara professional dan akuntabel melakukan pemberian pendidikan politik kepada seluruh masyarakat daerah agar bersikap antusias dalam menyukseskan pemilu.

Hal tersebut disebabkan tingkat kesadaran pendidikan politik masyarakat yang belum memadai, bagi mereka sendiri dianggap menjadi suatu hal yang diwajibkan di tengah ketidakpastian atas politik itu sendiri. Ketidakpastian di sini bisa jadi disebabkan banyaknya aktor-aktor politik yang terlibat kasus korupsi,

ketimpangan atas hukum, dan masalah sosial kemasyarakatan yang menyangkut keberlangsungan pemilu .

Kurangnya partisipasi aktif masyarakat di Kabupaten Majene Kecamatan Banggae Timur disebabkan karena kurangnya kesadaran pendidikan politik untuk ikut serta berpartisipasi menyukseskan Pemilu. Maka dari itu, disinilah pentingnya peran KPU dalam menjalankan perannya sesuai undang-undang nomor 8 tahun 2015 pasal 13 yang menyatakan : “Melaksanakan pendidikan politik kepada masyarakat untuk penyelenggaraan pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Majene atau Kota kepada masyarakat ”.

Partisipasi politik di kabupaten Majene begitu rentan tergoyahkan oleh beberapa kelompok-kelompok tertentu, apalagi dari orang terdekat mereka misalnya kerabat mereka sendiri, yaitu dari orang tua sampai keluarga terdekat mereka, dan juga yang lebih memprihatinkan lagi ialah masih kurang pemahaman bagi masyarakat yang akan berproses dalam penyelenggaraan pemilihan sehingga tidak memberikan hak suaranya pada pemilihan tersebut. Upaya terhadap pengedukasian masyarakat agar dapat berpartisipasi aktif serta dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dapat dilaksanakan melalui pendidikan politik .dipilih seorang tokoh pemimpin negara maupun daerah secara langsung ialah situasi atau keadaan yang sangat menentukan bagi suatu negara, oleh karenanya mesti diikuti dengan partisipasi politik.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas ada beberapa masalah yang akan di teliti tentang bagaimana strategi KPU Majene dalam menyikapi masalah di atas tersebut yang tak lain tentang pelaksanaan pendidikan politik

terhadap masyarakat kecamatan Banggae timur sehingga peneliti mengambil judul "*Strategi KPU Kabupaten Majene dalam memberikan Pendidikan politik menjelang PILKADA Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 di Kecamatan Banggae Timur*".

B. RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang masalah di atas, Maka penulis dapat Menguraikan Rumusan Masalah Dalam Penelitian ini. Adapun Rumusan Masalah Pada Penelitian ini adalah Sebagai Berikut:

Bagaimana Strategi KPU Kabupaten Majene dalam Memberikan pendidikan Politik Politik Menjelang Pilkada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Kecamatan Banggae Timur

1. Bagaimana Strategi KPU Kabupaten Majene dalam Memberikan pendidikan Politik Politik Menjelang Pilkada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 Di Kecamatan Banggae Timur
2. Apa tantangan KPU untuk meningkatkan pendidikan politik?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk strategi pendidikan Politik KPU dalam meningkatkan Partisipasi politik masyarakat pada Pemilu menjelang PILKADA pemilihan umum legislatif 2024 .

2. Penelitian ini mengetahui apa saja tantangan KPU pada saat melakukan partisipasi .

3. D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian dapat dibagi ke dalam dua sifat yaitu manfaat penelitian yang bersifat teoretis dan manfaat penelitian yang bersifat praktis.

1. Manfaat Teoretis

Secara teoretis penelitian ini menjelaskan mengenai strategi komisi pemilihan umum (KPU) Kabupaten Majene dalam memberikan pendidikan politik dalam perspektif teori partisipasi politik menurut Faulks (dalam Eko Handoyo 2016). Pendidikan politik dilaksanakan dengan tujuan membuat rakyat menjadi melek politik, sehingga mereka menjadi sadar politik, lebih kreatif dan mampu berpartisipasi dalam kegiatan politik dan pembangunan dalam bentuknya yang positif. Dengan pendidikan politik ini, diharapkan tercipta pribadi politik yang bertanggung jawab terhadap bangsa dan negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi pembaca

Menambah ilmu pengetahuan kepada pembaca mengenai Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam memberikan pendidikan di kabupaten Majene kecamatan Banggae timur.

b. Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti-peneliti lain untuk mengadakan penelitian yang sejenis pada masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.2 KERANGKA TEORI

2.2.1. Definisi Strategi

Definisi pertama yang di kemukakan oleh Chandler menyebutkan bahwa “Strategi adalah tujuan Jangka panjang dari suatu perusahaan, serta pendayagunaan dan alokasi semua sumber daya yang penting mencapai tujuan tersebut” pemahaman yang baik mengenai konsep strategi dan konsep-konsep lain yang berkaitan , sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun.²

Menurut Chandler(1962) Secara fundamental simpulan ini menyatakan sebuah proses berurutan dimana strategi secara sentral ditentukan pertama kali dan kemudian diimplementasikan melalui struktur organisasi yang tepat. strategi ini merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program pemilihan tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber daya. Konsep-konsep tersebut adalah:³

1. Distince Competence

Distince Competence, yaitu tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan lebih baik dibandingkan dengan pesaingnya . suatu

² *Alfred, D. Chandler, Jr Strategi and Structure: Chapters in the History of the industrial Enterprise. Cambridge mass:MIT press.*

³ *Freddy Ranguti, Bussnises Plan, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2000)*

perusahaan yang memiliki kekuatan yang tidak mudah ditiru oleh perusahaan pesaing dipandang sebagai perusahaan yang memiliki distinctive competence. Distinctive competence menjelaskan kemampuan spesifik organisasi.. Menurut Day dan Wesley identifikasi distinctive competence dalam suatu organisasi meliputi :

a) Keahlian tenaga kerja

b) Kemampuan sumber daya

2. Competitive Advantage

Competitive Advantage, adalah kegiatan spesifik yang dikembangkan oleh perusahaan agar lebih unggul di bandingkan pesaingnya agar lebih unggul dibandingkan dengan pesaingnya. Keunggulan bersaing di sebabkan oleh pilihan strategi yang di lakukan perusahaan untuk merebut peluang pasar.

a) Tingkat-tingkat Strategi

Dengan merujuk pada pandangan dan Schendel dan Charles Hofer, Higgins (dalam salusu 2006: 101) menjelaskan adanya empat tingkatan strategi. Keseluruhannya disebut Master Strategy, yaitu enterprise strategy, corporate strategy, business strategy, dan functional strategy. Beberapa penulis lain seperti Wheelen dan Hunger (dalam salusu 2006: 101) mengenal tiga tingkatan strategi saja, yang didalamnya corporate strategy sudah mencakup enterprise strategy.

1. Enterprise strategy

Strategi ini berkaitan dengan respons masyarakat. Setiap organisasi mempunyai hubungan dengan masyarakat. Masyarakat adalah kelompok yang

berada diluar organisasi yang tidak dapat dikontrol. Didalam masyarakat yang tidak terkendali itu, ada pemerintah dan berbagai kelompok lain seperti kelompok penekan, kelompok politik dan kelompok sosial lainnya. Kelompok-kelompok mempunyai interes dan tuntunan yang sangat bervariasi terhadap organisasi, sesuatu yang perlu diberi perhatian oleh para penyusun strategi. Jadi, dalam strategi interprise terlihat relasi antara organisasi dan masyarakat luar, sejauh interaksi itu akan dilakukan sehingga dapat menguntungkan organisasi.

2. Corporate strategy

Strategi ini berkaitan dengan misi organisasi, sehingga sering disebut grand strategy yang meliputi bidang yang digelut oleh suatu organisasi. Ini memerlukan keputusan-keputusan stratejik dan perencanaan stratejik yang selengkap-lengkapnya juga disiapkan oleh setiap organisasi.

3. Business strategy

Strategi pada tingkat ini menjabarkan bagaimana merebut pasaran ditengah masyarakat. Bagaimana menempatkan organisasi dihati para penguasa, Para pengusaha, Para anggota legislatif, Para donor, Para politisi, Dan sebagainya. Semua itu dimaksudkan untuk dapat memperoleh keuntungan-keuntungan stratejik yang sekaligus mampu menunjang berkembangnya organisasi ketingkat yang lebih baik.

4. Functional strategy Strategi ini merupakan strategi pendukung dan untuk menunjang suksesnya strategi lain. Ada tiga jenis strategi fungsional yaitu:

- a. Strategi fungsional ekonomi yaitu mencakup fungsi-fungsi yang memungkinkan organisasi hidup sebagai satu kesatuan ekonomi yang sehat.
- b. Strategi fungsional manajemen, mencakup fungsi-fungsi manajemen, yaitu planning, organizing, implementing, controlling, staffing, leading, motivating, communicating, decision making, representing dan integrating.
- c. Strategi isu stratejik, fungsi utamanya ialah mengontrol lingkungan, baik situasi lingkungan yang sudah diketahui maupun situasi yang belum diketahui atau selalu berubah.

Dalam mencoba menjelaskan tentang tipe-tipe strategi, Koteen (dalam Salusu 2006: 104) sesungguhnya tidak berbeda pandangan dengan Higgins, Wheelen dan Hunger, meskipun mereka yang disebut terakhir ini mengklasifikasikan strategi itu kedalam apa yang disebut tingkat-tingkat strategi. Tipe-tipe strategi dimaksud adalah sebagai berikut.

1. Corporate strategy (strategi organisasi).

Strategi ini berkaitan dengan perumusan misi, tujuan, nilai-nilai, dan inisiatif-inisiatif stratejik yang baru.

2. Program strategy (strategi program). Strategi ini lebih memberi perhatian pada implikasi-implikasi stratejik dari suatu program tertentu.

3. Resource support strategy (strategi pendukung sumber daya).

Strategi sumber daya ini memusatkan perhatian pada memaksimalkan pemanfaatan sumber-sumber daya esensial yang tersedia guna meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

4. Institusional strategy(Strategi Kelembagaan)

Fokus dari strategi institusional ialah mengembangkan kemampuan organisasi untuk melaksanakan inisiatif-inisiatif stratejik

Strategi adalah Pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan gagasan ,perencanaan, deneksekusi, sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu .didalam strategi yang baik terdapat kordinasi tim kerja , memiliki tema mengidentifikasi faktor pendukungnya sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan gagasan secara rasional ,efisiensi dalam pendanaan dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan.

a.Tujuan Strategi

Menurut Bambang Hariadi tahun 2005, perumusan strategi adalah proses-proses penyusunan langkah demi langkah yang bertujuan untuk visi dan misi organisasi yaitu:

a. Mengidentifikasi atau memahami lingkungan sekitar perusahaan dimasa depan dan menentukan visi misi perusahaan guna tercapainya tujuan bersama.

b. Melakukan analisis internal dan eksternal perusahaan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan serta peluang dan ancaman di masa yang akan datang yang menghambat tercapainya misi.

- c. Merumuskan dan merencanakan faktor-faktor ukuran keberhasilan dari strategi yang sudah di buat pada tahap analisis
- d. Menentukan ukuran tujuan target, mengevaluasi dan memeriksa strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.
- e. Memilih strategi yang sesuai untuk mencapainya tujuan jangka pendek dan panjang.

b .Perencanaan Strategi

Chandler (dalam Salusu 2015 : 64) untuk mencapai suatu proses pencapaian tujuan dengan baik maka berikut beberapa perencana strategi yang perlu diperhatikan:

a. Formulasi dan sasaran jangka panjang

Tahap formulasi ini menunjukkan bahwa adanya kejelasan dalam perencanaan, hal ini dapat dilihat dari penentuan tujuan pelaksanaan sosialisasi, sasaran pelaksanaan sosialisasi serta mengenai identifikasi ancaman dan peluang, kekuatan dan kelemahan organisasi.

b. Pemilihan tindakan

Untuk mencapai visi misi serta tujuan suatu organisasi maka selalu dibutuhkan suatu perencanaan strategi matang, hal yang sangat penting juga yaitu pada saat pelaksanaannya karena bilamana pelaksanaan strategi tersebut tidak dapat dijalankan dengan maksimal maka sangat berpengaruh terhadap hasil

capaian yang akan diperoleh. Selain itu menurut Hitt dkk (dalam Salusu 2015:167) mengatakan bahwa pada tahapan pemilihan tindakan harus disesuaikan dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat tercapai misi utama organisasi tersebut.

c. Alokasi sumber daya

Sumber daya merupakan unsur yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya suatu kegiatan, bilamana sumber daya tersebut tidak memadai maka akan sangat berpengaruh terhadap capaian kinerja yang akan diperoleh.

2.2.2. Pengertian Komisi Pemilihan Umum

Komisi Pemilihan Umum adalah nama yang diberikan oleh Undang-Undang tentang Pemilu untuk lembaga penyelenggara pemilu. UUD 1945 Amandemen pasal 22E, menerangkan bahwa nama lembaga penyelenggara pemilu tidak diharuskan bernama Komisi Pemilihan Umum, melainkan perkataan umum untuk menyebutkan lembaga penyelenggara Pemilu, sehingga sebenarnya UU dapat saja memberikannya lain untuk menyebut lembaga penyelenggara Pemilu. Keterangan mengenai komisi pemilihan umum dijelaskan dalam Undang-Undang RI No. 22 tahun 2007 tentang penyelenggara pemilihan umum pasal 1 Ayat 7 yang menyebutkan bahwa KPU adalah : Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota adalah, penyelenggara Pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.

KPU merupakan suatu lembaga independen penyelenggara pemilihan umum di Indonesia yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu dinyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Penyelenggaraan pemilu KPU bertugas dalam melaksanakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Sebelum Pemilu 2004, anggota-anggotanya dapat diisi oleh unsur-unsur partai politik, namun setelah dikeluarkannya UU No. 4 tahun 2000 anggota KPU diharuskan non-partisipan.

Seiring berjalannya waktu, untuk meningkatkan kualitas pemilu salah satunya penyelenggaraan pemilu. KPU sebagai penyelenggara pemilu dituntut untuk independen dan non-partisipan. Untuk itulah terjadi beberapa revisi undang-undang tentang pemilu pasca Orde Baru. Sebelumnya penyelenggaraan pemilu diatur dengan UU No. 12 tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, dan DPRD, UU No. 23 tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian muncul UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Menjelang pemilu 2009 dibuat pula UU No. 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disertai revisi undang-undang pemerintahan daerah yaitu UU No. 32 tahun 2004 direvisi dengan UU No. 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah. Kemudian DPR dan Pemerintah mensyahkan UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Dalam UU No. 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu diatur lebih lanjut

mengenai badan-badanlain yang bertugas dalam mewujudkan pemilu yang Jurdil danLuber. Badanbadan tersebut yaitu:

- (1) Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu)
- (2) Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi)
- (3) Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
- (4) Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan)
- (5) Panitia Pengawas Pemilu Lapangan
- (6) Pengawas Pemilu Lapangan
- (7) Pengawas Pemilu Luar Negeri
- (8) Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKKP)
- (9) Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)
- (10) Panitia pemungutan Suara (PPS)
- (11) Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN)
- (12) Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)
- (13) Kelompok Pnyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri

KPU mempunyai arti penting dalam jalannya Pemilu di Indonesia sebagailembaga yang sangat berperan didalam mengatur pelaksanaan

Pemilusehingga diharapkan perannya dapat membawa Pemilu kepada demokrasi yang jujur dan adil. Implementasi dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang No 32 Tahun 2004 diantaranya tentang penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah langsung di daerahdaerah, maka setiap daerah memiliki KPU Daerah yang disebut dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten atau Kota. Akibat dari amanat UU No 32 Tahun 2004 inimenimbulkan adanya peranaan yang dimiliki oleh KPU Daerah.⁴

a). Visi dan Misi Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Komisi Pemilihan Umum memiliki Visi: “TerwujudnyaKomisiPemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel,demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkanPancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan RepublikIndonesia”. Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 (lima)misi(www.kpu.go.id), yaitu:

- a. Membangun lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yangmemiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalammenyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b. Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, DewanPerwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil

⁴ Peran komisi pemilihan umum (KPU)dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih peulah pada PILKADA tahun 2015 di kabupaten kedal .

Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;

- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d. Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan Pemilihan Umum secara konsisten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- e. Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

2.2.3. Pendidikan politik

1. Pengertian pendidikan Politik

Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017, dalam rangka pendidikan politik, KPU wajib memfasilitasi penyebaran materi kampanye yang meliputi visi, misi, dan program melalui laman KPU dan lembaga penyiaran publik. Kampanye pemilu sebagaimana dimaksud, menurut undang-undang ini dilaksanakan selama dua puluh satu hari, dan berakhir sampai dengan dimulainya masa tenang. Konsep pendidikan politik terdiri dari dua kata kunci pokok yaitu pendidikan dan politik, pendidikan erat kaitannya dengan politik, hubungan pendidikan dengan politik sangat empiris dan sudah berlangsung lama. Pendidikan dalam hal ini adalah proses yang dilakukan secara sengaja untuk menggali dan mengembangkan potensi yang ada pada diri peserta didik agar mereka memiliki kemampuan dalam menanggapi lingkungan secara positif atau

melakukan perubahan (pengetahuan, sikap dan perilaku) yang bermakna bagi dirinya, masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Politik (politics) adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai the good life ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu (Budiardjo, 2008:15).

Pendidikan politik diartikan pula sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik yang ideal yang hendak dibangun. Keberhasilan pendidikan politik antara lain ditentukan oleh adanya suatu perspektif yang jelas yang bisa diperoleh melalui dua dimensi, yaitu berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan dan realita atau keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri yang langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal (Alfian, 1978:235). Pendidikan politik berkaitan erat dengan sosialisasi politik, hal ini dikarenakan pendidikan politik dengan sosialisasi politik sama-sama memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai politik baik secara sadar atau tidak sadar yang berujung pada sikap mengajak dan memberikan pengetahuan.

Dalam konsep pendidikan politik terdapat dua konsep pokok, yaitu pendidikan dan politik, karenanya sebelum dielaborasi pengertian pendidikan politik, perlu dijelaskan makna pendidikan dan arti politik. Secara etimologis, pendidikan berasal dari kata latin, *educare*, yang berarti melatih. Dalam lapangan pertanian, dikenal kata *educere*, yang berarti menyuburkan atau mengolah tanah agar menjadi subur. Dalam arti demikian, pendidikan adalah proses yang membantu menumbuhkan, mengembangkan, mendewasakan, menata, dan mengarahkan. Khan (2010:1) mengartikan pendidikan sebagai proses pengembangan berbagai macam potensi yang ada dalam diri manusia agar dapat berkembang.

Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik). Pendidikan politik sebagai upaya yang dilakukan secara sengaja dan sistematis untuk membentuk individu yang sadar mengenai pentingnya ikut dalam kegiatan politik dan berkepribadian politik, agar mampu menjadi partisipan yang bertanggung jawab.

Surbakti (2010:150) pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis di antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses ini, para anggota masyarakat mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sistem politik seperti sekolah, pemerintah dan partai politik, pendidikan politik diberikan kepada peserta didik dalam rangka untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai, norma dan

simbol politik yang dianggap baik dan ideal. Hal ini berarti terjadi interaksi secara langsung antara pemberi dan penerima pendidikan politik mengenai sistem politik yang berlaku dalam suatu negara karena dianggap ideal dan baik.

Pendidikan politik menurut Ruslan (dalam Handoyo 2010) sebagai upaya-upaya yang dicurahkan oleh lembaga-lembaga pendidikan baik formal maupun non formal yang berusaha membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik yang sejalan dengan kultur politik orang-orang yang bergerak di lembaga-lembaga tersebut pada setiap warga negara, membentuk dan menumbuhkan kesadaran politik dengan segala tingkatan warga negara sehingga menjadi sadar dan mampu memperoleh sendiri kesadarannya, membentuk dan menumbuhkan kemampuan partisipasi politik secara aktif dan ikut memecahkan persoalan-persoalan umum masyarakatnya dengan segala bentuk partisipasi yang memungkinkan dan yang mengantarkan kepada perubahan menuju ke arah yang lebih baik.

Jadi, pendidikan politik dimaknai sebagai suatu usaha sadar dan terencana dari seseorang untuk menyadarkan dan memberikan pengetahuan kepada orang lain yaitu dari orang dewasa kepada generasi muda sebagai penerus perjuangan bangsa yang dilakukan secara berkesinambungan untuk memantapkan orientasinya terhadap politik. Kegiatan pendidikan politik yang dilaksanakan ini diharapkan para generasi muda mampu untuk berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan perpolitikan dalam bangsa dan negara sehingga muncullah kader-kader muda yang lebih kompeten dalam memperjuangkan politik bangsa secara

demokratis dan mampu bertanggung jawab secara etis dengan dimilikinya kesadaran politik yang dimiliki para partisipan muda tersebut.

2. Tujuan Pendidikan Politik

Tujuan pendidikan politik menurut Inpres Nomor 12 Tahun 1982 tentang Pendidikan Politik bagi Generasi Muda adalah menciptakan generasi muda yang sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagai salah satu usaha untuk membangun manusia Indonesia seutuhnya. Hal ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat agar menjadi sadar akan politik dan lambat laun akan mengembangkan bakat dan minat seseorang untuk ikut serta berpartisipasi di dunia politik dan mampu bersaing secara positif, kritis, kreatif serta bertanggung jawab dan berpedoman penuh pada Pancasila dan UUD 1945.

“Pendidikan politik berkaitan erat dengan pendidikan nasional mempunyai dua tujuan yaitu: pertama, membuat rakyat (individu, klien, anak didik, dan warga masyarakat) mampu memahami situasi sosial politik yang penuh konflik secara tanggung jawab dan kritis terhadap konflik yang terjadi. Kedua, menampilkan peranan insani dari setiap individu sebagai warga negara dengan mengembangkan semua bakat, potensi dan kemampuannya (pengetahuan, sikap, wawasan dan keterampilan) agar ia dapat aktif berpartisipasi dalam proses politik demi pembangunan bangsa dan negara. Khusus bagi generasi muda, tujuan pendidikan politik bagi generasi muda adalah: (1) membangun generasi muda Indonesia yang sadar politik dan sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, (2) sebagai salah satu usaha untuk membangun

manusia Indonesia seutuhnya, yang perwujudannya tercermin dalam sejumlah sifat watak atau karakteristik kepribadian Indonesia” (Kartono, 1989).

Undang–Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik menyebutkan bahwa tujuan dari pendidikan politik yang dilaksanakan partai politik adalah meningkatkan kesadaran hak dan kewajiban masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan partisipasi politik dan inisiatif masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, meningkatkan kemandirian, kedewasaan dan membangun karakter bangsa dalam rangka memelihara persatuan dan kesatuan bangsa yang sesuai dengan Pancasila.

5

Pendidikan politik dewasa ini sangat didukung oleh ketersediaan dan kemudahan akses informasi, hal ini akan semakin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dunia politik bahkan para aktivis partai politik sehingga kecurangan-kecurangan dan elite politik tidak dapat menggunakan kekuasaannya dengan bebas dan memonopoli para kaum muda yang masih rentan terhadap sikap pragmatisme dan materialistis (Firmanzah, 2007:49), kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada zaman sekarang ini semakin memudahkan seseorang untuk mengakses informasi politik secara detail dari media massa ataupun media elektronik yang dapat di terima oleh berbagai kalangan masyarakat sehingga dapat meminimalkan terjadinya kecurangan dan cacat hukum dari kegiatan politik.

Tujuan pendidikan politik pada dasarnya adalah memberikan pengetahuan kepada individu ataupun kelompok mengenai betapa pentingnya sebagai anggota

⁵ Undang-undang nomor 2 tahun tentang partai politik

warga negara untuk ikut serta dalam penyusunan pemerintahan dan aktif dalam berbagai kehidupan politik yang ada melalui hal-hal kecil, misalnya dengan menjadi anggota partai (kader), ikut serta memberikan suara dalam kegiatan pemilihan umum, ataupun menjadi peserta kampanye suatu partai politik. Pendidikan politik dapat membentuk warga negara yang mempunyai sikap kritis, aktif dan mampu melaksanakan aktifitas-aktifitas politik secara benar dan terhindar dari kecurangan-kecurangan aktifitas politik.

2.2.4. Aspek Pendidikan Politik

1. Aspek Kognitif

Aspek kognitif bertujuan untuk membangun pengetahuan politikwarga negara terhadap konsep-konsep dasar politik tertentu sangat penting untuk dibangun karena dengan ini kesadaran politik yang kritis akan terbangun sebagai salah satu syarat penting bagi suatu partisipasi warga yang otonom.

2. Aspek Afektif

Proses mengenalkan dan menanamkan nilai-nilai tertentu pada seorang warga negara, nilai-nilai politik yang disampaikan dalam pendidikan politik ini adalah nilai yang mengandung unsur demokrasi.

3. Aspek Psikomotorik

Aspek psikomotorik pendidikan politik mencakup kecakapankecakapan warga negara yang meliputi kecakapan intelektual (kecakapan berpikir kritis) dan partisipasi yang terkait.

2.2.5. Bentuk Pendidikan Politik

Pendidikan politik yang diberikan kepada para generasi muda dapat dilaksanakan melalui beragam cara ada yang secara langsung ataupun tidak langsung, media yang digunakan secara langsung misalnya diskusi terbuka, pelatihan, pengajian ataupun kegiatan lain yang dilakukan secara langsung bertatap muka sedangkan pendidikan politik yang dilaksanakan secara tidak langsung melalui spanduk, leaflet ataupun selebaran. Bentuk dan cara untuk mensosialisasikan pendidikan politik terhadap para kaum muda dalam suatu daerah dilakukan dengan cara :

a) .Pengajaran pendidikan politik yang benar

Pengajaran pendidikan politik yang benar dapat dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain sehingga akan memperoleh pengetahuan mengenai politik yang sesungguhnya dan akan terpengaruh untuk ikut serta berpartisipasi dalam suatu keadaan politik tertentu.

b) . Diskusi

Diskusi dapat dijadikan media para anggota untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan dari pendidikan politik ataupun situasi politik terkini sehingga dapat mengevaluasi partai politiknya dan menentukan strategi untuk memenangkan dan merancang kemenangan partai politik.

c) .Pelatihan kepemimpinan

Pelatihan kepada kaum muda untuk dapat menjadi pemimpin yang mampu bertanggungjawab dan dapat berpikir kritis dalam menghadapi suatu masalah serta dapat mengeluarkan pendapat secara etis dan profesional dalam konflik politik yang terjadi.

d) .Pendidikan politik melalui bidang keolahragaan

Olahraga merupakan salah satu cabang kegiatan yang paling disukai para kaum muda, karena dengan berolahraga seseorang akan bebas mengekspresikan dirinya melalui pertandingan-pertandingan yang diadakan.

e) .Publikasi dan Komunikasi massa

Salah satu alternatif metode yang memungkinkan sikap dan garis partai dapat diketahui oleh masyarakat luas sehingga peristiwa, momentum dan informasi yang penting dapat diketahui oleh seluruh elemen masyarakat (Dhakidae, 2004:106).

Sosialisasi politik terdiri dari dua macam bentuk kegiatan yaitu pendidikan politik dan indoktrinasi politik. Sosialisasi politik atau pendidikan politik dalam arti kata yang longgar adalah bagian langsung dari kehidupan masyarakat sehari-hari, disenangi atau tidak, diketahui atau tidak, disadari atau tidak hal itu dialami oleh anggota-anggota masyarakat baik penguasa maupun orang awam.

Indoktrinasi politik adalah proses sepihak ketika penguasa memobilisasi dan memanipulasi warga masyarakat untuk menerima nilai, norma, dan simbol

yang dianggap pihak yang berkuasa sebagai ideal dan baik, melalui berbagai forum pengarahan yang penuh paksaan psikologis, dan latihan yang penuh disiplin. Pendidikan politik dapat diartikan sebagai usaha yang sadar untuk mengubah proses sosialisasi politik masyarakat, sehingga mereka memahami dan menghayati betul nilai-nilai yang terkandung dalam suatu sistem politik ideal. Keberhasilan pendidikan politik ditentukan oleh perspektif yang jelas melalui dua dimensi, berupa gambaran jelas tentang sistem politik ideal yang diinginkan serta keadaan sebenarnya dari masyarakat itu sendiri secara langsung bisa diperbandingkan dengan tuntutan sistem politik ideal.

Dalam praktiknya pendidikan politik dapat dilakukan oleh berbagai agen. Seperti agen-agen yang diungkapkan Afan Gaffar (2002: 102) yaitu: keluarga, sanak saudara, kelompok bermain, sekolah (mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi). Yang kemudian dilanjutkan oleh berbagai media elektronik maupun cetak, seperti televisi, koran, dan radio.

2.2.8. Penelitian Terahulu

Dilihat dari Pendekatan tersebut Melalui Peneliti sebelumnya (jurnal) diantaranya :

Tabel 1. Jurnal peneliti Terdahulu

N	Nama	Judul	Penelitian	Hasil	Persamaa	Perbedaa
o	peneli	skripsi		penelitian	n	n
	ti					

1	Petrus Gleko (2017)	Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya meningkatkan partisipasi Politik masyarakat pada pemilihan umum kepala daerah.	Penelitian kualitatif	Kedala strategi KPU malang dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat pada pemilu pada tahun 2015 antara lain: 1.kurangn ya dukungan untuk sosialisai, 2.	Persamaa n dengan penelitian tersebut pada variabel yang diteliti yaitu: Tentang strategi KPU meningkatkan partisipas i masyarakat politik	Perbedaa nnya terletak pada objek dan tempat penelitia n dan tempat penelitia n.
---	---------------------	---	-----------------------	--	--	--

				<p>kurangnya respon masyarakat dalam mengikuti kegiatan sosialisasi KPU ,</p> <p>3. keterbatasan sumber daya.</p>		
2	Dwi haryo no (2016)	Strategi KPU dalam meningkatkan Partisipasi Pemilih Pada pemilihan Walikota dan wakil WALikota	Penelitian kualitatif	Strategi atau upaya yang dilakukan KPU Samarinda dalam meningkatkan partisipasi Pemilih	Persamaan dengan penelitian tersebut pada variable yang diteliti yaitu: Tentang strategi	Perbedaan nya terletak pada objek dan tempat penelitian dan tempat penelitian

		Samarinda Tahun 2015		pada Pemilihan walikota dan wakil walikota Samarinda Tahun 2015 antara lain: Strategi Penguatan Kelembag aan , Strategi Sosialisasi Politik ,St rategi Pendidika n Pemula.	KPU meningk atkan partisipas i masyarak at politik dan dan mengetah ui perkemb angan pendidik an politik	n
--	--	-------------------------	--	---	---	---

2.2.9 Kerangka Berpikir

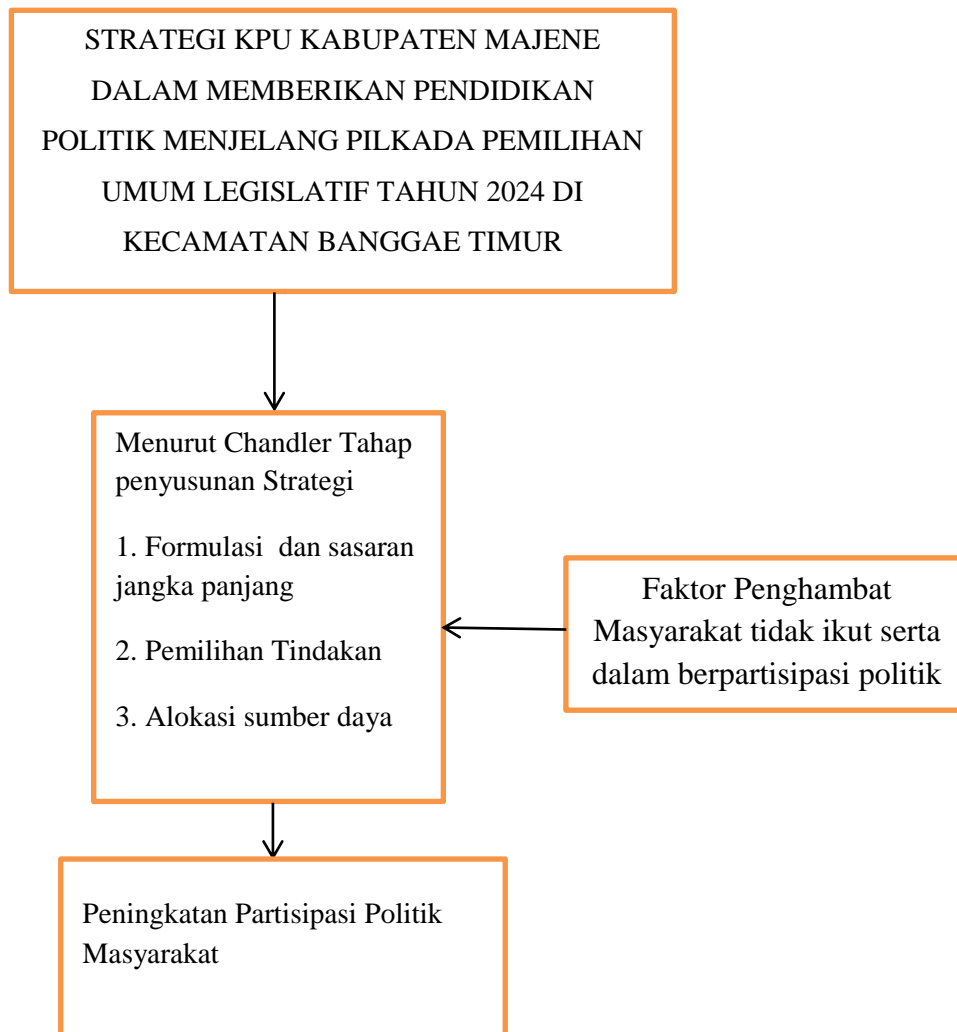
Keterlibatan masyarakat dalam pemilu menuntut adanya partisipasi dari masyarakat. Partisipasi yang tinggi dari masyarakat dalam pemilu juga mengisyaratkan kelegitimasi calon kepala daerah tersebut. Partisipasi masyarakat dalam pemilu juga dapat menjadi bukti kedewasaan kita dalam berdemokrasi. Maka dari itu upaya untuk meningkatkan pendidikan politik dalam meningkatkan partisipasi masyarakat harus terus dilakukan termasuk dalam memfasilitasi penyelenggara pemilu.

Strategi merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh individu atau organisasi dalam proses pencapaian tujuannya dengan mengambil langkah-langkah seperti menentukan tujuan dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan serta pengalokasian sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Chandler (dalam Salusu 2015: 64) berpendapat terdapat tiga indikator strategi, yaitu Formulasi dan sasaran jangka panjang, yang ditandai dengan perencanaan yang mempertimbangkan beberapa aspek penting mengenai kondisi lingkungan. Pemilihan tindakan, ditandai dengan pencapaian visi dan misi serta tujuan suatu organisasi dan Sumber daya yang ditandai dengan mendukung terlaksananya suatu kegiatan. Dari ketiga langkah pelaksanaan strategi tersebut bila dilaksanakan dengan baik maka akan dapat mencapai hasil yang maksimal.

2.2.10.Fokus Penelitian

Fokus Penelitian ini adalah Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Dalam meningkatkan pendidikan politik Partisipasi Politik Masyarakat dan faktor penghambat Sehingga Masyarakat tidak ikut dalam Partisipasi Politik .

tabel 2 kerangka Teori.



BAB V

PENUTUP

A. . Kesimpulan

Berdasarkan isi dari hasil analisis data dan faktayang peneliti dapatkan dilapangan serta disesuaikan dengan teori yang peneliti gunakan. Hail peneliti ini dilakukan untuk memberi penafsiran terhadap hasil yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Chandler di dalam teori ini memberikan penjelasan bagaimana srategi yang efktif dalam memberikan pendidikan politik, di antaranya :

- a. pada formulasi dan sasaran jangka penjang inimembahas tentang bagaimana perencanaan sosialisasi pendidikan politik. Berdasarkan temuan lapangan yang telah dijelaskan bapak Subhan Sudarmi, SH selaku kasubag perencanaan data dan informasi mengatakan bahwa pihak KPU Kabupaten majene melakukan sosialisasi pendidikan politik berkelanjutan baik melalui zoom antar sekolah,kampus,sosialisasi media sosial maupun media elektronik misalnya siaran radio. Strategi yang dilakukan KPU untuk memberikan sosialisasi tersebut masyarakat mengetahui tahapan-tahapan yang dilakukan saat pemilu berlangsung tahapan tersebut.
- b. Penentuan tindakan sosialisasi pendidikan politik sesuai dengan segmen yang ditujukan seperti yang dikatakan informan oleh bapak Nuradi, SH selaku kasubag Hukum dan SDM, yang mengatakan bahwa mereka melakukan kegiatan sosialisasi pendidikan politik kebeberapa segmen

perempuan, segmen yang pertama yaitu kepada masyarakat umum, mahasiswa, segmen perempuan, segmen keagamaan, dan beberapa segmen lainnya. Bukan hanya itu, pendidikan politik juga dilakukan dengan memanfaatkan media elektronik seperti siaran radio. Namun beberapa kegiatan lainnya yang dilakukan KPU Kabupaten Majene dengan Keikutsertaan KPU guna mendukung masyarakat agar ikut berpartisipasi saat pemilu seperti nobar, sosialisasi ke pesantren dan lainnya.

Jadi, masyarakat tau sehingga seluruh tahapan itu dapat terealisasi dilingkungan masyarakat khususnya pmilih pemula yang tidak mengetahui langkah-langkah pemilihan. Seperti ada yang di pelosok, kampung-kampung yang tidak bisa hadir, tapi mereka menyaksikannya melalui media online tersebut. Itu juga termasuk dari strategi KPU Kabupaten Majene dalam mensosialisasikan pemilu agar masyarakat mengetahui dan memahami apa saja kegiatan KPU.

- c. sumber daya , sumber anggar dana yang diberikan dari anggaran daerah yang kemudian dihibahkan kalau dia yang pilkada dana-dana itu yang kita pakai untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi, kegiatan-kegiatan pendidikan politik. Jadi sumber dananya jelas kalau dia pemilu kta gunakan APBN murni kalau dia pilkada kita gunakan dana Hibah kemudian di APBNkan . yang menjadi kendala KPU Kabupaten Majene, sosialisasi pendidikan politik pemahaman masyarakat terkait tahapan yang telah dilakukan oleh KPU, karena hanya melihat secara daring melalui media online, pendidikan pemilih yang yang cepat tanggap saat praktek langsung kelapangan mereka bisa melihat secara langsung bagaimana tata cara

untuk memilih , begitu juga dengan pihak-pihak yang terlibat dalam tugas sosialisasi kemasyarakatan. KPU Kabupaten Majene melaksanakan Bimket dan mengadakan briefing setiap seminggu sekali, ini adalah salah satu cara KPU agar pihak yang terlibat dalam mensosialisasikan pemilu agar dapat menyampaikan materi-materi dengan baik dan mudah di mengerti masyarakat..

B. Saran

- 1) Adanya penelitian skripsi ini, perlu di perhatikan oleh KPU Kabupaten Majene bahwa menjadi satu-satunya lembaga yang berwenang dalam menyelenggarakan pemilu diharapkan lebih maksimal dan memfasilitasi masyarakat terlebih terhadap sosialisasi pendidikan politik mengingat kesadaran politik sangat penting bagi masyarakat bagi pemilih-pemilih baru maupun pemilih lama tetap menjadi segmen yang diprioritaskan.
- 2) Dalam Melakukan sosialisasi pendidikan politik kemasyarakatan harus merata, kalangan masyarakat tersentuh, Untuk menciptakan pendidikan pemilih yang cerdas maka sosialisasi pendidikan harus diadakan secara berkelanjutan dan rutin pada masyarakat, bukan hanya pada saat ada pemilihan umum/pilkada saja. Hal tersebut harus menjadi konsumsi masyarakat khususnya pemilih untuk terlibat langsung setiap ada pemilihan.
- 3) Masyarakat hendaknya menjadi pemilih yang cerdas dalam menentukan pilihannya, jangan adanya dorongan uang tetapi memilih dengan melihat siapa pemimpin yang layak untuk dipilih. Serta tidak memiliki sikap apatis dan acuh pada pemimpin maupun daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rijali. (2018). Analisis Data Kualitatif. Jurnal Alhadharah. Vol 17
(No.33): 15
- Alfred, D. Chandler, Jr Strategi and Structure: Chapters in the History of the
industrial Enterprise. Cambridge mass:MIT press.
- Alfian. 1978. Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: PT. Gramedia
- Analisis Peran Komisi pemilihan umum (KPU) Dalam partisipasi Politik Masyarakat
di Pilkada Serta Meminimalisir Golput
- Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian. (Jakarta: PT Rineka Cipta)
- Bogdan, R ,& Biklen, S (1992) Qualitatif Researchfor Education. Boston, MA:
Allyn and Bacon
- Budiarjo, Miriam. 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka
Utama Buku sosiologi di terbitkan oleh fakultas sastra universitas.
buku sosiologi 1, diterbitkan oleh Fakultas Sastra Universitas Padjajaran
- Freddy Rangkuti, Bussnises Plan, (Jakarta:PT.Gramedia Pustaka Utama,2000)
- Gleko Petrus, 2017. “Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam upaya
meningkatkan partisipasi pemilukada” Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Malang. Vol.6.No.1.
- Handoyo, Eko. Puji, Lestari. 2017. Pendidikan Politik. Yogyakarta
<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/139/131>

<https://kab-majene.kpu.go.id/berita/baca/7778/literasi-pemilu-untuk-demokrasi>

http://repository.dharmawangsa.ac.id/399/6/BAB%20II_16210021.pdf

<https://kab-majene.kpu.go.id/berita/baca/7778/literasi-pemilu-untuk-demokrasi>

<https://kumparan.com/susi-yulyani/pentingnya-pendidikan-politik-bagi-masyarakat-1uTSfkoHICl>

<http://www.lampost.co/berita-partisipasi-politik-pemilih-pemula-pada-pilkadaserentak>

<https://m.metrotvnews.com/play/bmRCmpPX-kpu-majene-gelar-edukasi-pendidikan-politik-bagi-pelajar-sebagai-pemilih-pemula>

<https://majenekab.bps.go.id/indicator/12/307/1/jumlah-penduduk.html>

[https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/firmansyah%20Noor%20Affandi\(1\).pdf](https://pemerintahan.umm.ac.id/files/file/firmansyah%20Noor%20Affandi(1).pdf)

<https://upeks.co.id/2020/09/kpu-majene-sosialisasi-pendidikan-pemilih/>

<https://www.neliti.com/id/publications/165049/strategi-penerapan-pendidikan-politik-sebagai-upaya-peningkatan-partisipasi-poli>

Peran komisi pemilihan umum (KPU) dalam melaksanakan pendidikan politik untuk meningkatkan partisipasi aktif pemilih peulah pada PILKADA tahun 2015 di kabupaten kedal .

Siyasah: Jurnal hukum tata Negara e-ISSN:2656-9671, p-ISSN:2685-6077
volume 5, Edisi II (DesesMBER 2022), www.ejurnal.an-nadwah.ac.id